

Dampak Demokrasi terhadap Integrasi Pemilu dan Kampanye Digital dalam Pilkada Garut

Jaliludin Muslim^{1*}, Daffa Syafiq Nurjaman¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding Author E-mail: jaliludin@uinsgd.ac.id

Abstract

This study examines the role of digital campaigns in the Pilkada Garut, focusing on their impact on electoral integrity and democratic participation. Utilizing a qualitative descriptive-analytic approach, the research analyzes how digital campaigns influence voter behavior and election transparency. Data collection involved bibliometric analysis using Google Scholar and VOSViewer to identify trends in digital campaigns, electoral integrity, and democracy literature, alongside content analysis of relevant articles and reports. Additionally, in-depth interviews with four voters from various Garut districts provided primary insights. Findings reveal that digital campaigns effectively mobilize voters, particularly youth, through targeted social media messaging. However, challenges such as misinformation and unequal access to technology threaten electoral integrity and equitable participation. The study concludes that while digital campaigns can enhance democracy by increasing voter engagement, strategies must ensure equitable information access and mitigate digital misinformation risks. Recommendations include enhancing digital literacy, improving digital infrastructure in remote areas, and fostering collaboration with social media platforms to protect electoral integrity.

Keywords: Participation, Democracy, Election Integrity.

Abstrak

Studi ini mengkaji peran kampanye digital dalam Pilkada Garut, dengan fokus pada dampaknya terhadap integritas elektoral dan partisipasi demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis bagaimana kampanye digital memengaruhi perilaku pemilih dan transparansi pemilu. Pengumpulan data melibatkan analisis bibliometrik menggunakan Google Scholar dan VOSViewer untuk mengidentifikasi tren dalam kampanye digital, integritas elektoral, dan literatur demokrasi, di samping analisis konten artikel dan laporan yang relevan. Selain itu, wawancara mendalam dengan empat pemilih dari berbagai distrik Garut memberikan wawasan utama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kampanye digital secara efektif memobilisasi pemilih, khususnya kaum muda, melalui pesan media sosial yang terarah. Namun, tantangan seperti misinformasi dan akses yang tidak merata terhadap teknologi mengancam integritas elektoral dan partisipasi yang adil. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kampanye digital dapat meningkatkan demokrasi dengan meningkatkan keterlibatan pemilih, strategi harus memastikan akses informasi yang adil dan mengurangi risiko misinformasi digital. Rekomendasi meliputi peningkatan literasi digital, perbaikan infrastruktur digital di daerah terpencil, dan pembinaan kolaborasi dengan platform media sosial untuk melindungi integritas elektoral.

Kata Kunci: Partisipasi, Demokrasi, Integritas Pemilu.

PENDAHULUAN

Pilkada adalah salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara

* Copyright (c) 2024 **Jaliludin Muslim and Daffa Syafiq Nurjaman**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: Oktober 7, 2024; Revised: December 20, 2024; Accepted: December 31, 2024

langsung. Pilkada Garut, sebagai bagian dari kontestasi demokrasi di tingkat lokal, mencerminkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Teori demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Dahl (1989) menyatakan bahwa demokrasi yang sehat mengharuskan adanya partisipasi politik yang luas, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin mereka dengan cara yang adil dan transparan. Dalam konteks Pilkada Garut, demokrasi partisipatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihargai dalam setiap langkah pemilihan.

Namun, meskipun Pilkada merupakan pilar utama dalam demokrasi, pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan besar dalam hal integrasi pemilu yang transparan dan adil. Teori sistem pemilu yang dijelaskan oleh Taagepera dan Shugart (1989) menekankan bahwa sistem pemilu yang efektif harus mampu menjamin pemilihan yang bebas dari manipulasi dan mendukung keadilan bagi seluruh pemilih. Integrasi pemilu di Pilkada Garut harus dapat memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan bebas dari pengaruh eksternal yang merusak, seperti disinformasi yang sering kali tersebar melalui kampanye digital.

Teori Governance menyatakan bahwasanya kolaborasi antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik, yang dalam konteks Pilkada Garut, melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, calon legislatif, dan masyarakat umum (Rhodes, 1997). Transparansi dalam proses pemilu adalah kunci untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan adil dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan (Bovens, 2007). Integrasi kampanye digital dalam Pilkada Garut harus dikelola sedemikian rupa sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

E-Governance juga menjadi relevan dalam konteks ini, di mana penggunaan teknologi digital dalam kampanye politik menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilu.

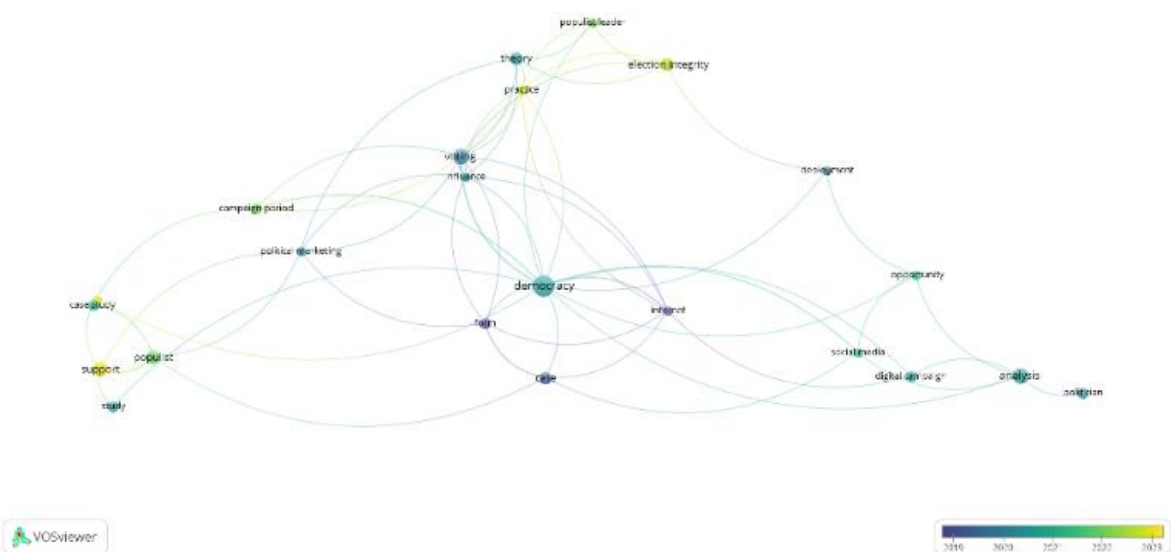
Penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan mengingat Pilkada Garut merupakan representasi dari dinamika pemilu di tingkat lokal yang harus mempertanyakan sejauh mana integrasi pemilu dapat terwujud, serta bagaimana kampanye digital dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Kampanye digital yang semakin menjadi alat utama dalam Pilkada Garut membawa tantangan baru terkait dengan penyebaran disinformasi dan ketimpangan akses teknologi yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kampanye digital terhadap integritas pemilu dan bagaimana kedua hal ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi kualitas demokrasi di Pilkada Garut. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana digitalisasi kampanye mempengaruhi demokrasi lokal dan bagaimana akses teknologi yang tidak merata dapat mempengaruhi partisipasi politik.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji hubungan antara demokrasi, integritas pemilu, dan kampanye digital di Pilkada Garut. Fokus pada penggunaan kampanye digital dalam konteks pemilu lokal memberikan sudut pandang baru yang belum banyak dibahas secara spesifik. Namun, untuk memperkuat klaim *novelty*, artikel ini menonjolkan bagaimana konteks lokal Garut memberikan temuan yang berbeda dibandingkan daerah lain, terutama dalam dinamika kampanye digital di wilayah dengan tingkat akses teknologi yang mungkin bervariasi. Garut, sebagai salah satu daerah dengan karakteristik geografis dan demografis yang unik, menawarkan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana kampanye digital dapat diintegrasikan dalam proses pemilu lokal yang memiliki tantangan tersendiri terkait infrastruktur dan akses teknologi.

Gambar 1 menunjukkan Hasil analisis menggunakan *VOSViewer* dengan database *Google Scholar* yang mencakup 100 artikel dari tahun 2014 hingga 2024, mengungkapkan pola yang signifikan dalam perkembangan topik-topik terkait Demokrasi, Integrasi Pemilu, dan Kampanye Digital. Dalam sebaran temporal artikel yang teridentifikasi, terlihat adanya perbedaan mencolok antara penelitian yang lebih lama dan yang lebih baru. Penelitian yang lebih tua lebih banyak berfokus pada partisipasi pemilih, teori demokrasi, serta prinsip-prinsip dasar pemilu dengan kata kunci seperti "Partisipasi", "Pemilih", dan "Keadilan". Namun, artikel-artikel yang lebih baru

menunjukkan pergeseran fokus yang jelas, dengan kata kunci yang lebih terkait dengan kampanye digital, integrasi pemilu, media sosial, dan disinformasi. Namun, artikel-artikel yang lebih baru menunjukkan pergeseran fokus yang jelas, dengan kata kunci yang lebih terkait dengan kampanye digital, integrasi pemilu, media sosial, dan disinformasi.

Gambar 1. Overlay Visualization



(Sumber: VOSViewer, Diolah Peneliti)

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, terutama dalam bidang kampanye pemilu, penelitian-penelitian terkini lebih banyak membahas tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih, serta tantangan yang ditimbulkan oleh penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Warna yang lebih terang dalam visualisasi menunjukkan dominasi topik-topik terkait kampanye digital dan media sosial, yang semakin menjadi pusat perhatian dalam pemilu, sementara topik tradisional yang berkaitan dengan integritas pemilu dan partisipasi politik lebih banyak dibahas dalam artikel-artikel yang lebih lama.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kampanye digital telah menjadi fokus yang semakin banyak diteliti, masih terdapat *research gap* yang signifikan dalam mengkaji dampak langsung dalam konteks Pilkada Garut. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, mengingat meningkatnya

penggunaan kampanye digital dalam pemilu lokal dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kampanye digital terhadap integritas kampanye dalam Pilkada Garut.

Dengan demikian, hasil analisis *VOSViewer* menegaskan bahwa meskipun ada perhatian yang signifikan terhadap kampanye digital dalam pemilu, integrasi pemilu dalam konteks lokal seperti Pilkada Garut masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam literatur yang ada. Penelitian ini akan mengisi *gap* tersebut dan memberikan kontribusi baru mengenai hubungan antara kampanye digital, integritas pemilu, dan demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami secara mendalam fenomena kampanye digital dalam Pilkada Garut, serta hubungannya dengan integritas pemilu dan kualitas demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi masyarakat dan menganalisis praktik-praktik yang terjadi dalam kampanye digital, serta dampaknya terhadap transparansi dan keadilan pemilu.

Metode kualitatif, menurut Creswell (2014), adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, melalui pengumpulan data non-numerik dan analisis mendalam. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi fenomena yang lebih kompleks, seperti pengaruh kampanye digital terhadap integritas pemilu dalam konteks lokal.

Untuk mendalami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dan analisis konten sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan pengolahan data. Analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan Google Scholar sebagai database utama, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan kata kunci serta tren yang muncul dalam literatur terkait kampanye digital, integritas pemilu, dan demokrasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan *VOSViewer*, sebuah perangkat lunak untuk visualisasi dan analisis data

bibliometrik yang memetakan hubungan antar konsep, serta menggambarkan perkembangan tren dalam penelitian terkait. VOSViewer memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan keterkaitan antara topik-topik penting dalam penelitian ini, seperti kampanye digital, integritas pemilu, dan media sosial, yang dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara fenomena-fenomena tersebut.

Sebagai pelengkap dari analisis bibliometrik, penelitian ini juga menggunakan analisis konten terhadap artikel-artikel yang relevan untuk menggali lebih dalam mengenai tema-tema utama yang muncul, seperti dampak kampanye digital terhadap integritas pemilu dan bagaimana hal ini memengaruhi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Analisis konten dilakukan dengan cara mengkodekan tema-tema utama dalam artikel yang dipilih, yang akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola terkait penggunaan kampanye digital dalam Pilkada Garut. Proses pengkodean ini bertujuan untuk memahami bagaimana kampanye digital memengaruhi pemilih dan keputusan mereka, serta bagaimana hal ini dapat memperkuat atau melemahkan integritas pemilu.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan empat pemilih di Kecamatan Cimanganten, Tarogong Kidul, dan Tarogong Kaler. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pemilih mengenai dampak kampanye digital terhadap perilaku memilih mereka dan persepsi mereka terhadap integritas pemilu. Pertanyaan wawancara difokuskan pada frekuensi penggunaan media sosial untuk mencari informasi Pilkada, tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diterima, pengalaman dengan disinformasi, serta pengaruh kampanye digital terhadap partisipasi politik mereka.

Beberapa artikel yang menggunakan metode serupa telah banyak dibahas dalam literatur, di antaranya adalah artikel oleh Margetts & Ben-Ghiat (2019) yang berjudul "The impact of social media on political campaigns: A review and research agenda" yang menggunakan analisis bibliometrik dan analisis konten untuk memetakan pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih dalam kampanye politik. Artikel lain yang relevan adalah Garnett & James (2020) yang membahas "Cyber elections in the digital age: Threats and opportunities of technology for electoral integrity", yang juga menggunakan analisis bibliometrik untuk menilai dampak teknologi terhadap integritas pemilu. Artikel

oleh Miller & Vaccari (2020), "Digital threats to democracy: Comparative lessons and possible remedies", menggunakan pendekatan serupa untuk mengkaji bagaimana kampanye digital dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan integritas pemilu dalam konteks pemilu di era digital.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara kampanye digital, integritas pemilu, dan demokrasi dalam Pilkada Garut, serta mengisi research gap yang ada dalam literatur mengenai pemilu lokal dan penggunaan teknologi dalam konteks ini. Melalui analisis bibliometrik dan analisis konten, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman bagaimana kampanye digital dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan integritas pemilu di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Digital dalam Pilkada Garut

Peningkatan penggunaan kampanye digital dalam Pilkada Garut mencerminkan transformasi signifikan dalam cara calon kepala daerah berkomunikasi dengan pemilih. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi politik, program kerja calon, serta ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kampanye digital memungkinkan calon-calon independen untuk menjangkau pemilih tanpa bergantung pada dukungan partai politik besar (Andrian & Wardani 2021). Hal ini membuka peluang bagi calon yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya untuk mendapatkan eksposur yang lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye digital efektif dalam memobilisasi pemilih dengan cara yang lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Data dari Bawaslu Garut (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ada batasan terhadap pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), calon-calon kepala daerah lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka. Kampanye melalui platform digital memungkinkan penyesuaian pesan yang lebih tepat melalui teknik microtargeting, memanfaatkan data pemilih untuk fokus pada segmen tertentu. Hal ini meningkatkan relevansi dan efektivitas pesan politik yang disampaikan.

Namun, penggunaan kampanye digital juga membawa tantangan serius, terutama terkait dengan penyebaran disinformasi dan konten yang menyesatkan. Berdasarkan laporan Bawaslu Garut (2024), lembaga ini menghadapi kesulitan dalam mengawasi penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Disinformasi yang menyebar melalui media sosial dapat merusak integritas proses pemilu, karena pemilih yang terpapar dengan informasi palsu cenderung membuat keputusan yang tidak rasional. Selain itu, pengaruh kampanye digital terhadap pemilih muda di Garut sangat terasa. Pemilih muda, yang lebih terhubung dengan media sosial, cenderung menerima dan berbagi informasi yang mereka temui di platform digital meskipun terkadang informasi tersebut tidak sepenuhnya valid (Samsudin et al., 2023).

Selain itu, penelitian ini mencatat adanya ketidaksetaraan dalam akses teknologi yang mempengaruhi efektivitas kampanye digital di berbagai daerah. Beberapa daerah di Garut, khususnya yang terpencil, masih mengalami kendala dalam hal akses internet, yang membatasi partisipasi pemilih dalam kampanye digital. Hal ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar pemilih di daerah tersebut tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi. Ketidaksetaraan ini menciptakan disparitas informasi yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dalam Pilkada Garut.

Hasil Wawancara dengan Pemilih

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kampanye digital terhadap Pilkada Garut, dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pemilih di wilayah Garut. Wawancara ini bertujuan untuk memahami frekuensi penggunaan media sosial untuk mencari informasi terkait Pilkada Garut, sumber utama informasi, tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diterima, pengalaman dengan informasi palsu, serta pengaruh kampanye digital terhadap partisipasi politik mereka. Berikut adalah temuan utama dari wawancara tersebut:

1. Frekuensi Penggunaan Media Sosial: Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menggunakan media sosial sangat sering untuk mencari informasi terkait Pilkada Garut. Misalnya, salah satu responden mengatakan, "Saya sangat sering menggunakan Facebook dan Instagram untuk

mengikuti perkembangan Pilkada Garut karena informasi di sana lebih cepat dan update." Responden lainnya menambahkan bahwa media sosial merupakan sumber informasi yang paling mudah diakses dan sering diperbarui.

2. Sumber Utama Informasi: Sebagian besar responden mengidentifikasi media sosial sebagai sumber utama informasi mereka tentang Pilkada Garut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden, "Media sosial adalah sumber utama saya karena di sana banyak informasi langsung dari calon dan partai politik." Namun, ada juga beberapa responden yang masih mengandalkan televisi sebagai sumber informasi utama, terutama yang lebih tua atau tinggal di daerah dengan akses internet terbatas.
3. Tingkat Kepercayaan terhadap Informasi di Media Sosial: Responden memberikan tingkat kepercayaan sebesar 3 pada skala 1-5 terhadap informasi yang diterima melalui media sosial. Salah satu responden menyatakan, "Saya cukup percaya dengan informasi di media sosial, tapi tetap waspada dan sering cross-check dengan sumber lain." Tingkat kepercayaan yang moderat ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menerima informasi secara sepenuhnya dari media sosial.
4. Pengalaman dengan Informasi Palsu: Dua dari empat responden melaporkan sering menemukan informasi yang dianggap tidak benar atau menyesatkan di media sosial. Salah satu responden mengungkapkan, "Saya sering menemukan berita yang tidak jelas sumbernya atau terlihat mencurigakan di Instagram. Kadang-kadang sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu." Responden lainnya mengalami hal ini kadang-kadang, menunjukkan adanya tantangan serius terkait disinformasi dalam kampanye digital.
5. Pengaruh Informasi Palsu terhadap Keputusan Memilih: Sebagian besar responden (75%) menilai pengaruh informasi palsu terhadap keputusan memilih mereka sebagai 4 pada skala 1-5. Seperti yang dikatakan salah satu responden, "Informasi palsu bisa sangat mempengaruhi keputusan saya

karena seringkali disertai dengan emosi yang kuat." Ini menunjukkan bahwa disinformasi memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pemilih.

6. Kendala dalam Mengakses Informasi Digital: Dua responden mengalami kendala dalam mengakses informasi digital terkait Pilkada Garut, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Salah satu responden menyatakan, "Di desa kami, akses internet masih terbatas, jadi sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Pilkada." Hal ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan akses teknologi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik di beberapa daerah.
7. Motivasi dari Kampanye Digital: Dua responden merasa kampanye digital sangat memotivasi dan memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam proses pemilu. Salah satu responden menyatakan, "Kampanye digital membuat saya lebih tertarik untuk ikut serta karena informasi yang disampaikan lebih interaktif dan mudah dipahami." Namun, dua responden lainnya merasa netral, menunjukkan variasi respon terhadap efektivitas kampanye digital.
8. Metode Kampanye yang Dianggap Efektif: Mayoritas responden (75%) menganggap kombinasi kampanye digital dan tradisional sebagai metode yang lebih efektif dalam mempengaruhi keputusan memilih. Salah satu responden menyatakan, "Saya merasa kombinasi antara iklan di TV dan kampanye di media sosial lebih efektif karena menjangkau berbagai demografis." Sementara satu responden menganggap kampanye tradisional lebih efektif, terutama untuk menjangkau pemilih yang kurang terhubung dengan teknologi digital.
9. Kebutuhan Edukasi tentang Disinformasi: Tiga dari empat responden (75%) merasa membutuhkan informasi tambahan atau edukasi tentang cara mengenali disinformasi di media sosial. Seperti yang dikatakan salah satu responden, "Saya merasa perlu lebih banyak edukasi tentang bagaimana membedakan informasi yang benar dan palsu agar tidak terpengaruh oleh berita bohong." Ini mendukung kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital sebagai bagian dari strategi menjaga integritas pemilu.

Implikasi Temuan Wawancara

Temuan dari wawancara ini memperkuat analisis sebelumnya mengenai peran kampanye digital dalam Pilkada Garut. Adanya prevalensi penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi menunjukkan pentingnya integrasi teknologi dalam strategi kampanye. Namun, tingkat kepercayaan yang moderat terhadap informasi di media sosial dan tingginya pengalaman dengan disinformasi menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital dan mekanisme verifikasi informasi. Ketidaksetaraan akses teknologi yang diidentifikasi melalui kendala akses informasi digital juga menyoroti pentingnya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur digital guna memastikan partisipasi politik yang inklusif dan adil. Dalam hal ini, upaya untuk memperbaiki infrastruktur digital harus menjadi perhatian utama bagi pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan benar-benar inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, motivasi yang dirasakan oleh sebagian responden terhadap kampanye digital menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan muda. Pentingnya edukasi tentang cara mengenali disinformasi di media sosial yang diungkapkan oleh mayoritas responden juga mendukung rekomendasi untuk memperkuat program edukasi dan literasi digital sebagai bagian dari strategi menjaga integritas pemilu.

Integritas Pilkada Garut

Integritas Pilkada Garut merupakan isu utama yang harus dijaga, mengingat potensi penyalahgunaan kampanye digital yang dapat merusak proses pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu Garut memainkan peran penting dalam mengawasi dan menjaga integritas proses pemilu, terutama terkait dengan kampanye digital. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Garut (2024), lembaga ini telah menerapkan pengawasan ketat terhadap konten internet, guna memastikan bahwa kampanye digital yang dilakukan oleh calon tetap dalam koridor yang sah. Pengawasan ini melibatkan pemantauan terhadap platform media sosial yang digunakan untuk menyebarkan materi kampanye.

KPU Garut juga terlibat dalam menjaga integritas pilkada dengan menerapkan peraturan yang membatasi penggunaan alat peraga kampanye pada masa tenang. Hal ini untuk menghindari kampanye berlebihan yang dapat mempengaruhi pemilih

menjelang pemilihan. KPU Garut (2024) menyebutkan bahwa selama masa tenang, penyebaran informasi terkait Pilkada hanya dapat dilakukan melalui platform resmi yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang, dan media sosial harus mematuhi aturan tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kampanye digital tidak berjalan secara berlarut-larut dan tidak mempengaruhi pemilih menjelang hari pemilihan.

Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Garut dan KPU Garut untuk memastikan integritas pilkada, pengawasan terhadap kampanye digital tetap menjadi tantangan. Teori Sistem Pemilu (Taagepera & Shugart, 1989) menyatakan bahwa sistem pemilu yang baik harus menciptakan keadilan bagi semua pemilih dan calon. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kampanye digital menjadi elemen penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam Pilkada Garut. Bawaslu Garut telah mengidentifikasi bahwa pengawasan terhadap media sosial membutuhkan lebih banyak sumber daya dan pendekatan yang lebih proaktif, karena media sosial memiliki kecenderungan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas tanpa pengawasan yang memadai.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Bawaslu Garut adalah adanya ketidakjelasan aturan terkait pengawasan kampanye digital. Karena media sosial terus berkembang dan banyak digunakan oleh pemilih dan calon, pengawasan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya efektif. Bawaslu Garut juga mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk melaksanakan pengawasan secara menyeluruh, banyak konten politik yang beredar di platform-platform ini tidak dapat langsung dipantau secara langsung, yang berisiko menciptakan manipulasi informasi yang dapat merusak integritas pilkada.

Namun, penggunaan kampanye digital juga membawa tantangan serius, terutama terkait dengan penyebaran disinformasi dan konten yang menyesatkan. Berdasarkan laporan Bawaslu Garut (2024), lembaga ini menghadapi kesulitan dalam mengawasi penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Disinformasi yang menyebar melalui media sosial dapat merusak integritas proses pemilu, karena pemilih yang terpapar dengan informasi palsu cenderung membuat keputusan yang tidak rasional.

Dua dari empat responden melaporkan sering menemukan informasi yang dianggap tidak benar atau menyesatkan di media sosial. Salah satu responden dari Kecamatan Cimanganten menyatakan, "Saya sering menemukan berita yang tidak jelas sumbernya atau terlihat mencurigakan di Instagram. Kadang-kadang sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu." Responden lainnya dari Kecamatan Tarogong Kaler menambahkan, "Informasi palsu di media sosial bisa sangat mempengaruhi keputusan saya karena seringkali disertai dengan emosi yang kuat."

Selain itu, dua responden lainnya mengalami kendala dalam mengakses informasi digital terkait Pilkada Garut, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Salah satu responden dari Kecamatan Cimanganten menyatakan, "Di desa kami, akses internet masih terbatas, jadi sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Pilkada." Hal ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan akses teknologi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik di beberapa daerah.

Ketidaksetaraan akses teknologi dan penyebaran disinformasi merupakan tantangan utama yang dapat merusak integritas pemilu. Disinformasi tidak hanya mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional oleh pemilih tetapi juga menciptakan ketimpangan informasi antara wilayah yang memiliki akses teknologi tinggi dan yang terbatas. Literatur global, seperti yang dijelaskan oleh Bennett & Livingston (2018), menekankan pentingnya strategi mitigasi disinformasi yang melibatkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan platform digital untuk menangani penyebaran informasi palsu secara efektif. Disinformasi yang tersebar melalui media sosial sering kali bersifat viral dan sulit dikendalikan karena sifat platform tersebut yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Responden dari Kecamatan Cimanganten menggambarkan betapa sulitnya mereka untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan memilih mereka secara signifikan. Penggunaan algoritma oleh platform media sosial yang sering kali menampilkan konten berdasarkan popularitas atau engagement dapat memperkuat penyebaran konten yang tidak valid atau bias, sehingga memperburuk masalah disinformasi.

Tak hanya itu, ketidaksetaraan akses teknologi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi partisipasi politik. Pemilih yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki

akses internet yang terbatas tidak dapat memanfaatkan kampanye digital secara maksimal, sehingga mereka terhambat untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dan kualitas demokrasi.

Demokrasi dalam Pilkada Garut

Demokrasi dalam Pilkada Garut semakin dipengaruhi oleh penggunaan kampanye digital. Dengan kemudahan akses informasi yang diberikan oleh kampanye digital, lebih banyak pemilih yang terlibat dalam proses pemilu dan lebih banyak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Teori Demokrasi Partisipatif (Pateman, 1970), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi.

Dari empat responden, dua merasa kampanye digital sangat memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam proses pemilu. Salah satu responden dari Kecamatan Tarogong Kidul menyatakan, "Kampanye digital membuat saya lebih tertarik untuk ikut serta karena informasi yang disampaikan lebih interaktif dan mudah dipahami." Namun, dua responden lainnya merasa netral, menunjukkan variasi respon terhadap efektivitas kampanye digital.

Penggunaan kampanye digital dapat memperluas partisipasi politik dan memberikan pemilih lebih banyak akses terhadap informasi mengenai calon-calon kepala daerah. Namun, keberagaman dalam akses teknologi dan tingkat literasi digital di berbagai wilayah mempengaruhi seberapa efektif kampanye digital dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Di daerah dengan literasi digital yang tinggi, kampanye digital lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan mendorong keterlibatan pemilih. Sebaliknya, di daerah yang lebih terpencil atau dengan tingkat literasi digital yang rendah, kampanye digital mungkin kurang efektif, mengakibatkan partisipasi yang tidak merata dan kualitas demokrasi yang terancam.

Integrasi demokrasi digital melalui kampanye ini dapat menciptakan ruang baru untuk partisipasi politik yang lebih inklusif. Dengan menyediakan platform interaktif dan akses informasi yang mudah, kampanye digital memungkinkan pemilih untuk terlibat dalam diskusi politik, memberikan feedback langsung kepada calon, dan merasa lebih terlibat dalam proses pemilu. Namun, untuk mencapai hal ini, penting untuk memastikan

bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan platform tersebut secara efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji dampak kampanye digital terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi lokal dalam konteks Pilkada Garut. Hasil wawancara dengan pemilih menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama informasi, namun tingkat kepercayaan terhadap informasi di media sosial masih moderat dan disinformasi menjadi tantangan signifikan. Ketidaksetaraan akses teknologi juga diidentifikasi sebagai faktor yang dapat menghambat partisipasi politik yang inklusif, menyoroti pentingnya konteks lokal Garut dalam memahami dinamika kampanye digital, termasuk karakteristik politik, literasi digital, dan akses teknologi yang beragam.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan program edukasi dan literasi digital untuk membantu pemilih mengenali serta memverifikasi disinformasi di media sosial, sambil memperkuat pengawasan konten melalui peningkatan sumber daya dan strategi yang lebih efektif. Investasi dalam infrastruktur digital, khususnya di daerah terpencil, sangat penting untuk memastikan akses informasi yang setara bagi semua pemilih dan meningkatkan partisipasi politik secara inklusif. Selain itu, kolaborasi dengan platform media sosial diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghapus konten palsu serta memastikan bahwa informasi kampanye tetap dalam koridor yang sah. Terakhir, adopsi strategi kampanye kombinasi yang menggabungkan metode digital dan tradisional akan meningkatkan efektivitas dalam menjangkau berbagai demografis pemilih. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan integritas pemilu dapat terjaga dan demokrasi lokal dapat berkembang secara inklusif serta adil, khususnya dalam konteks Pilkada Garut.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah responden dan mencakup berbagai daerah di Garut untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak kampanye digital secara lebih objektif dan mengidentifikasi korelasi antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, A., & Wardani, S. B. E. (2021). Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. *Journal of Politics and Democracy*. Retrieved from <https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi/article/view/3>
- Bawaslu Garut. (2024). Bawaslu Garut Gelar Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye. Retrieved from <https://jabarprov.go.id/berita/bawaslu-garut-gelar-rapat-koordinasi-penertiban-alat-peraga-kampanye-16479>
- Bawaslu Garut. (2024). Tim FAS Pengawasan Konten Internet Bawaslu Garut Siap Awasi Pemilu 2024. Retrieved from <https://jabarprov.go.id/berita/tim-fas-pengawasan-konten-internet-bawaslu-garut-siap-awasi-pemilu-2024-11747>. [Accessed 6th December 2024]
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(3), 250-267. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Garnett, H. A., & James, T. S. (2020). Cyber elections in the digital age: Threats and opportunities of technology for electoral integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 118-136. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633>
- Jabarprov. (2024). Pj Bupati Garut Pimpin Ikrar Netralitas ASN Pada Pilkada 2024. Retrieved from <https://jabarprov.go.id/berita/pj-bupati-garut-pimpin-ikrar-netralitas-asn-pada-pilkada-2024-15277>. [Accessed 6th December 2024]
- KPU Garut. (2024). Masa Tenang Dimulai, Tidak Ada Lagi APK Terpasang. Retrieved from <https://jabarprov.go.id/berita/kpu-garut-masa-tenang-dimulai-tidak-ada-lagi-apk-terpasang-16476>. [Accessed 6th December 2024]
- Margetts, H., & Ben-Ghiat, R. (2019). The impact of social media on political campaigns: A review and research agenda. *Journal of Political Communication*, 36(1), 25-46. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1583599>
- Miller, M. L., & Vaccari, C. (2020). Digital threats to democracy: Comparative lessons and possible remedies. *International Journal of Press/Politics*, 25(4), 493-513. <https://doi.org/10.1177/1940161220922323>

- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Samsudin, S., Iskandar, J., & ... (2023). Kader Partai Politik Dalam Mewujudkan Kinerja Kader Partai (Studi Kasus Kinerja Kader Partai Golkar dalam Pencapaian Hasil Pilkada di Kabupaten Garut). *Indonesian Journal of...* Retrieved from <https://jurnal.pps.uniga.ac.id/index.php/ijpam/article/view/253>
- Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems*. New Haven: Yale University Press.